BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi terhebat selama 40 tahun terjadi di Samudra Hindia. Pusat gempa bumi yang terletak 150 kilometer dari daerah pesisir di Provinsi Aceh itu menimbulkan gelombang tsunami yang dahsyat. Dari 12 negara yang dilanda gelombang tsunami tersebut, Indonesia merupakan wilayah yang paling parah kerusakannya. Sekitar 130.000 orang tewas, 37.000 orang hilang, dan 500.000 orang lainnya terpaksa mengungsi. Kerusakan fisik yang terjadi pun tidak pernah terbayangkan; sepanjang 800 kilometer daerah pesisir rusak parah. Seluruh desa di sekitar pantai itu hancur berantakan (http://know.brr.go.id/dc/presentations/20061200 _Aceh_Nias_Dua_Tahun_Setelah_Tsunami.pdf (Diakses tanggal 9 Agustus 2009)).

Kedahsyatan tsunami tersebut telah menghancurkan kawasan pesisir di Aceh. Empasan ombak yang merasuk jauh ke pantai menghancurkan daratan. Kota-kota yang terletak di sepanjang Pantai Barat, Pantai Timur dan Pantai Utara Aceh, terutama Banda Aceh hingga Meulaboh, dibuat porak poranda. Bencana yang terjadi hari minggu pagi itu benar-benar mengguncang Asia, Afrika dan juga dunia, jelaslah Indonesia yang paling menderita. Tetapi tidak hanya Indonesia yang mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan 8,9 Skala Richter dengan episentrum di sekitar Meulaboh itu, tetapi juga negara-negara yang terletak di Teluk Benggali hingga Benua Afrika. Tayangan televisi menambah drama dari bencana gempa bumi yang

tergolong terbesar keempat sepanjang sejarah bencana dunia. Efeknya bukan hanya seketika, tetapi mendunia dan interaktif, sampai-sampai sekarang ini orang begitu akrab dengan istilah tsunami (http://know.brr.go.id/dc/presentations/20061200_Aceh_Nias_Dua_Tahun_Setelah_Tsunami.pdf (Diakses tanggal 9 Agustus 2009)).

Tsunami adalah gelombang laut yang bergerak amat cepat yang disebabkan oleh adanya sentakan di lautan. Pemicunya gempa bumi, letusan gunung berapi atau hantaman meteor di laut. Batu setinggi lebih dari 20 metrik ton (setara dengan 4 truk) dapat terangkat dari lautan dan dilemparkan sejauh 180 meter ke daratan. Tsunami memiliki panjang gelombang (dari satu puncak gelombang ke gelombang lainnya) lebih dari 100 km, mereka bergerak dengan kecepatan sangat tinggi (Pikiran Rakyat, 27 Desember 2004).

Selain itu, gelombang tsunami ini juga menghancurkan sebagian besar insfrastruktur, pemukiman, sarana sosial seperti gedung sekolah, ekonomi dan lain-lain. Bencana itu juga mempengaruhi kondisi sosial politik masyarakat Aceh, termasuk dampak psikologisnya. Seperti telah kita ketahui bersama, sektor ekonomi termasuk sektor yang paling parah dihantam oleh tsunami. Imbas kerusakan itu terlihat pada bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan serta ketenagakerjaan. Perekonomian masyarakat lumpuh total dan butuh beberapa tahun untuk memulihkannya dan menjadikannya seperti semula. Tingkat kerusakan yang parah terjadi pada industri kecil menengah, dimana tingkat kerusakannya mencapai 65%,

hal ini dimaklumi karena sektor inilah yang menjadi garapan sebagian besar masyarakat Aceh. Sementara pada industri besar, tingkat kerusakannya sekitar 60% (Majalah Nangroe, edisi November 2005).

Pasca bencana tsunami, masyarakat Aceh tinggal dan berteduh di masjid, mushola, kantor, sekolah dan tenda-tenda darurat. Kondisi fisik dan lingkungan berbagai daerah di provinsi NAD akibat bencana alam. Khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia atau pusat gempa bumi seperti kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Besar lebih parah dari kondisi Kota Banda Aceh, disamping sarana dan prasarana umum hancur serta pelayanan pemerintahan lumpuh juga sampai beberapa hari wilayah ini terisolir, baik dari bidang transportasi maupun komunikasi, sehingga tim bantuan dan relawan tidak mendapat akses ke lokasi tersebut akibatnya ribuan mayat menjadi tak terurus di berbagai lokasi bencana seakan lamban tertangani (http://www.gemari.or.id/cetakartikel.php?id=1740 (Diakses tanggal 9 Agustus 2009)).

Dampak tsunami menurut Departemen Dalam Negeri (Depdagri): kabupaten-kabupaten yang berdampak parah adalah Aceh Jaya, tingkat kerusakan bangunan-bangunannya adalah 85%, Aceh Besar 80%, ibukota propinsi Banda Aceh 75%, Pulau Simeulu 50%, Pulau Sabang 45% dan Aceh Barat 60%. Perkiraan kerusakan dan kerugian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk propinsi Aceh dan Sumatera Utara adalah Rp 42,7 trilyun US$ 4,5 milliar. Ini termasuk lebih dari 250.000 buah rumah penduduk, 8 pelabuhan dan 4 depot BBM. Sebanyak 2.704 buah mesjid, 8 buah gereja, dan 2 buah pekong juga hancur.

Selebihnya, 423-km Jalan negara, 2.191-km jalan propinsi di Aceh tertutup (http://www.bakornaspbp.go.id/html/satkorlak.htm (Diakses tanggal 5 Oktober 2009)).

Masyarakat Aceh mendapatkan air bersih dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan non-PDAM. Di Banda Aceh, sebelum tsunami PDAM melayani 25.000 rumah, setelah tsunami PDAM hanya melayani 8000 rumah sumber dari non-PDAM biasanya di dapatkan di sumber-sumber mata air alami atau juga dari fasilitas-fasilitas lokal seperti mushola dan mesjid, di beberapa desa di Aceh Besar air dijual perunit yang tiap unitnya berisi 20 liter (Rp. 1000 – 2000) dan 200 liter (Rp. 5000). Di Meulaboh sebagian besar wilayah mempunyai kualitas air yang baik dan wilayah lainnya mempunyai kualitas air yang buruk (berwarna coklat).

Sumber air baku untuk penyediaan air bersih yang dikelola oleh PDAM berasal dari sungai Krueng Meureubo yang mempunyai debit rata-rata 100 m3/detik dan tersedia sepanjang tahun.Kebutuhan air sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk, rata-rata pertumbuhan penduduk di Kota Aceh sampai akhir tahun 2004 sebelum terjadinya tsunami sebesar 83,47 liter per detik dengan jumlah pelanggan 8.087 sambungan atau 75.00 persen dari 53.916 jiwa penduduk Kota Aceh yang terlayani, sedangkan kebutuhan air bersih setelah terjadinya tsunami dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Perkembangan kebutuhan air bersih sebelum dan sesudah terjadinya Tsunami di Aceh Tahun 2004-2009

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pelanggan	Penduduk Terlayani (%)	Demand lt/dt
2004	53916	8087	75.00	83.47
2005	52528	5179	35.00	53.41
2006	55147	6282	55.00	65.37
2007	55772	6566	60.00	76.34
2008	56405	7461	65.30	80.32
2009	57045	8557	85.00	88.31

Sumber Badan Pusat Statistik, P*rovinsi Nangroe Aceh Darussalam*,dalam Angka

Sedangkan 25 % penduduk Aceh memakai kebutuhan air bersih berasal dari sumur gali (http://esa.un.org/iys/review09/countries/indonesia/pdfs/Indonesia-WASHApril.pdf (Diakses tanggal 26 Agustus 2012)).

Dalam hal sanitasi, sebelum tsunami di Banda Aceh mempunyai 3 truk vakum, 11 truk sampah, tetapi semuanya rusak dan hanya tersisa 3 truk sampah. TPA (Tempat Pembuangan Sampah) Kampung Java di Banda Aceh juga rusak akibat tsunami, petugas pembersih sampah juga berkurang dari 250 orang menjadi hanya 50 orang. Masyarakat mengalami permasalahan dalam ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi karena 85% sarana air bersih dan 92% sistem sanitasi di daerah Aceh terkena dampak dari bencana bencana tsunami tersebut (http://www.bakornaspbp.go.id/html/satkorlak.htm (Diakses tanggal 5 Oktober 2009)). penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan pada kondisi normal, berdasarkan aturan otonomi daerah adalah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,

karena air bersih dan sanitasi lingkungan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga kewajiban penyediaannya adalah tanggung jawab Daerah yang bersangkutan. Tetapi dalam kondisi darurat pasca bencana alam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan menjadi sangat dilematis, mengingat air bersih dan sanitasi adalah sangat penting dan berguna untuk tetap terjaganya kondisi kesehatan minimal masyarakat, khususnya pengungsi dari wabah penyakit kulit dan diare.

Apalagi dalam kondisi bencana alam nasional, air bersih dan sanitasi menjadi hal yang sangat penting, karena tidak saja dibutuhkan oleh pengungsi tetapi juga para penduduk yang terkena dampak dari bencana alam dan para relawan baik yang tergabung dalam kesatuan-kesatuan resmi seperti PMI (Palang Merah Indonesia), kru media, Tim SAR (*Search and Rescue*) dan Satuan tugas TNI – POLRI. Sebagai dampak dari bencana alam tsunami, ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan menjadi benda langka yang tidak saja dibutuhkan oleh para pengungsi, tetapi juga setiap pendatang atau relawan yang berada di wilayah NAD, khususnya disekitar kamp-kamp dan masjid atau mushola serta prasarana umum lainnya yang aman dari bencana (http://www.gemari.or.id/cetakartikel.php?id=1740 (Diakses tanggal 9 Agustus 2009)).

Banyak sekali permasalahan ketersediaaan air bersih dan sanitasi MCK (mandi, cuci dan kakus) pasca bencana tsunami di NAD, khususnya disekitar Posko Darurat Bencana, seperti di belakang rumah Gubernur dan sekitarnya yang sangat memprihatinkan. Lokasi yang dihuni oleh tidak kurang dari 1000 orang yang berasal dari aparat pemerintah pusat, relawan (Indonesia dan Asing), kru media televisi,

mahasiswa IPDN, Tim SAR dan bahkan pengungsi memiliki keterbatasan dalam fasilitas tempat mandi, cuci dan toilet serta untuk kepentingan dapur umum. Beberapa organisasi internasional mengolah air sungai kota Banda Aceh menjadi air bersih secara cepat, hal ini membantu masyarakat Aceh dalam mengakses air bersih tetapi karena fasilitasnya terbatas bila dibandingkan dengan masyarakat Aceh yang membutuhkan air bersih, sehingga menimbulkan antrian yang panjang di tempat-tempat penyulingan air bersih (http://www.gemari.or.id/cetakartikel.php?id=1740 (Diakses tanggal 9 Agustus 2009)).

Berbagai organisasi, baik lokal maupun internasional memberikan bantuan untuk memulihkan keadaan di Aceh pasca tsunami. Begitu juga dengan USAID (*United States Agency for International Development*) yang merupakan lembaga pemerintah federal Amerika Serikat. Wilayah kerja USAID mencakup negara-negara di Afrika, Asia, Eropa Timur dan Eropa Tengah, Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah, dan negara-negara yang pernah bergabung dengan Uni Soviet. Lembaga ini bekerjasama dengan individu-individu, pemerintah dan organisasi lain dalam membantu pembangunan di sejumlah bidang.

USAID sudah sejak lama memberikan bantuannya ke Indonesia dalam berbagai sektor dengan program-programnya seperti :

1. Program Lingkungan dan Air (*Water and Environment Program -Basic Human Services*)
2. Program Pelayanan Lingkungan (*Environmental Services Program - ESP*)

3. Program Dukungan Konservasi Orang Utan (*Orangutan Conservation Support Program*)
4. Program Pelayanan Konserbasi Orang Utan (*Orangutan Conservation Services Program - OCSP*)
5. *Global Development Alliance: Forest Certification and Combating Illegal Logging.*

Dalam merespon tsunami yang terjadi di Aceh, USAID memberikan prioritas yang tinggi dalam memberikan bantuannya ke Provinsi Aceh dalam usahanya memulihkan keadaan di Aceh baik dalam fasilitas, sarana, prasarana dan lainnya. Dalam menanggapi permasalahan kekurangan air bersih dan sanitasi. USAID mempunyai program ESP (*Environmental Services Program*). Di Indonesia program ini diimplementasikan di provinsi-provinsi seperti Irian Jaya Barat, Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh (http://indonesia.usaid.gov/en/Activity.160.aspx.htm (Diakses tanggal 10 Agustus 2009)).

Tujuan dari program ESP ini antara lain : memperluas akses masyarakat terhadap air bersih dan jasa sanitasi, memperbaiki pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang lebih baik, meningkatkan produktifitas air. Program ini diharapkan dapat memberikan penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat Aceh yang berkurang atau rusak akibat bencana tsunami. Mengingat sangat pentingnya fasilitas tersebut untuk kelangsungan masyarakat Aceh yang berusaha bertahan hidup di tempat-tempat pengungsian yang serba kekurangan. Wilayah kerja ESP berada di 4 wilayah yang

paling terkena dampak dari bencana tsunami yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat. (http://www.esp.or.id/ contents/en_11.php (Diakses tanggal 11 Agustus 2009)).

Dalam pengimplementasian program-programnya USAID bekerjasama dengan instansi pemerintah yang ada dan organisasi-organisasi lainnya baik lokal maupun internasional seperti *International Medical Corps* (IMC), *International rganization for Migration* (IOM), *Islamic Relief, Jesuit Refugee Service* (JRS), Milenium, *Canadian Red Cross*, PMI, Oxfam, *Medicins San Frontier* (MSF), *World Vision*, *Church World Service Indonesia* (CWS), Genesis, PLAN, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), PCI, Mercy, UN HABITAT, dll. Sedangkan instansi pemerintah bekerjasama dengan memberikan perizinan dan surat-surat resmi lainnya dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, sehingga USAID bisa bekerja dengan baik.

Selama hampir 5 tahun program ESP bergerak di Aceh banyak keberhasilan-keberhasilan yang di capai seperti merehabilitasi lahan-lahan rusak, memberikan pelatihan dalam hal pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, peningkatan akses air bersih dengan tersedianya fasilitas sarana prasarana yang dibangun melalui program ESP, pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat dan perluasan dampak hasil kerja ESP. hasil yang dicapai antara lain :

1. 3.537 hektar lahan rusak telah direhabilitasi,
2. 17.897 hektar hutan bernilai konversi tinggi telah ditangani melalui pengelolaan lokal yang lebih baik,

3. 10.468 rumah tangga sekarang mendapat peningkatan akses air bersih,
4. 1.150 penerima manfaat dari dari 3 sistem pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat;
5. 1.710 penerima manfaat dari 3 sistem sanitasi skala kecil,
6. 2.125.555 Dollar sumber daya telah digalang untuk memperluas dampak hasil kerja ESP (http://www.esp.or.id/contents/en_11.php (Diakses tanggal 11 Agustus 2009)).

Hal-hal diatas bisa menjadi acuan keberhasilan program-program yang di jalan kan oleh USAID melalui program *Environmental Services Program* ESP selama kurun waktu 2004 hingga 2009 di wilayah Aceh pasca bencana tsunami dalam hal penyediaan air bersih dan sistem sanitasi dan hal lain yang berkaitan dengannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul :

"Peranan USAID melalui *The Environmental Services Program* (ESP) dalam Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Pasca Tsunami di Aceh(2004-2009)"

Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa mata kuliah terkait dalam program studi ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Yaitu :

1. Hubungan Internasional, mata kuliah ini berisi kajian tentang hubungan interaksi antar aktor satu dengan aktor lain dimana hubungan internasional Tidak hanya pada negara saja tetapi kerjasama dengan organisasi seperti ASEAN juga dapat menjadi aktor dalam hubungan internasional.

2. Isu-Isu Global

   Dalam mata kuliah isu-isu global memberikan gambaran tentang isu-isu yang sedang hangat untuk dikaji dalam hubungan internasional seperti masalah gender, hak asasi manusia, terorisme, dan juga lingkungan hidup.

3. Politik Luar Negeri.

   Mata kuliah ini membantu menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan oleh negara dalam interaksinya dengan negara lain, serta menjelaskan kebijakan politik luar negeri suatu negara yang diarahkan untuk menghadapi perubahan yang terjadi di luar wilayahnya demi pencapaian kepentingan nasional.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Dampak Tsunami Aceh tahun 2004 terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada penyediaan air bersih dan sanitasi di Aceh?
2. Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh USAID melalui program ESP dalam penyediaan air bersih dan sanitasi di Aceh?
3. Apa kendala USAID dengan program ESP dalam penyediaan air bersih dan sanitasi di Aceh?
4. Sejauh mana keberhasilan program ESP dalam menyediakan air bersih dan sanitasi di Aceh?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian akan memfokuskan pada masalah penyediaan air bersih dan sanitasi pasca tsunami yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam, dan bagaimana USAID sebagai Organisasi Internasional dengan programnya yaitu ESP menangani permasalahan tersebut, dalam hal ini penulis akan memfokuskan pada 4 wilayah, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, selama kurun waktu 5 tahun, yaitu Tahun 2004 hingga Tahun 2009.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan identifikasi diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk *research question*, sebagai berikut :

"Bagaimana peranan USAID melalui program *The Environmental Services Program* (ESP) dapat membantu meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di Aceh pasca bencana tsunami tahun 2004"

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dampak Tsunami Aceh tahun 2004 terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada penyediaan air bersih dan sanitasi di Aceh.

2. Untuk mengetahui Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh USAID melalui program ESP dalam penyediaan air bersih dan sanitasi di Aceh.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi USAID melalui program *The Environmental Services Program* (ESP) dalam menyediakan air bersih dan sanitasi di Aceh.
4. Untuk mengetahui keberhasilan apa saja yang telah dicapai USAID melalui program *The Environmental Services Program* (ESP) dalam penyediaan air bersih dan sanitasi di Aceh

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis: dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menguji serta menjelaskan konsep-konsep yang dipergunakan dalam sudi hubungan internasional dalam menjelaskan berbagai fenomena kerjasama internasional terutama pada pola kerjasama antara organisasi internasional dalam memberikan bantuan terhadap negara yang membutuhkan. Program-program organisasi USAID dalam membantu penyediaan air bersih dan sanitasi di Aceh bisa menjadi sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional dan menambah wawasan mengenai fungsi dari organisasi internasional.
2. Secara Praktis: Penelitian ini akan menjadi modalitas bagi para peneliti serta bagi para akademis ilmu hubungan internasional dapat mengambil keputusan-keputusan dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang dikorelasikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi USAID dalam memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang membutuhkan dalam berbagai sektor, khususnya di Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional.

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional merupakan suatu studi yang mempelajari aspek-aspek kehidupan yang melintasi batasan-batasan negara nasional. Hubungan ini sering disebut sebagai hubungan transnasional karena batas-batas kedaulatan suatu negara seolah-olah telah hilang atau dilanggar oleh hubungan yang ada. Hubungan internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, *nation-state*, maupun organisasi-organisasi internasional yang sifatnya lintas batas. Mengetahui hakikat dari hubungan antar aktor dalam percaturan hubungan internasional, maka kita harus membedah apa yang disebut interaksi internasional. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya hubungan tersebut merupakan suatu bentuk interaksi internasional.

Menurut Mc. Clelland, dalam Perwita, mendefinisikan bahwa Hubungan Internasional sebagai berikut: “Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.” (2005: 4)

Dalam menjalankan hubungan Internasional tidak hanya antara negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi internasional. Organisasi internasional diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas–batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu mesin kelembagaan kerjasama di antara pihak yang terkait dalam berbagai bidang. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan memberikan keuntungan terhadap negara, di mana ia berperan aktif aktif di dalamnya. “Kerjasama Internasional terjadi karena *National Understanding* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, yang di dukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama antara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik” (Kartasasmita, 1998:3).

Adapun faktor-faktor pendukung terwujudnya Kerjasama Internasional adalah :

1. Kemajuan di bidang teknologi yang memudahkan terjalinnya hubungan yang dapat dilakukan negara-negara, sehingga meningkatnya ketergantungan satu sama lain.
2. Kemajuan serta perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara.
3. Perubahan sifat perang dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi atau membela diri dalam bentuk Kerjasama Internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan berorganisasi merupakan salah satu metode Kerjasama Internasional (Rudi, 1993:22).

Kerjasama Internasional diwujudkan dalam suatu organisasi yang disebut Organisasi Internasional yang merupakan wadah pertemuan negara-negara dalam menyatukan masing-masing kepentingan menjadi suatu kesepakatan internasional, ini merupakan bukti adanya *International Understanding*.

Dalam kerjasama internasional bisa melibatkan beberapa negara di dalam suatu regional yang mempunyai keterkaitan tertantu, bekerjasama untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing atau bersama Menurut Andrew Hurrel, regionalisme merupakan perkembangan suatu integrasi sosial dalam suatu kawasan, yang secara tidak langsung merupakan suatu proses interaksi sosial dan ekonomi (Fawcett, Louis dan Hurrel. 1995: 39).

USAID ini merupakan organisasi yang memainkan peranan nasional Amerika Serikat, sebagai negara besar yang berusaha memberikan bantuan dalam berbagai sektor ke negara-negara berkembang. Dalam peranannya USAID menjalankan program-program yang menjadi output kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Maka peranan nasional juga merupakan posisi yang diambil atau dijalankan. Hubungan antara unit-unit nasional dalam sistem internasional tidak dapat dipahami hanya dengan melihat tindakan yang dilakukannya seperti pengiriman surat atau pernyataan perang. Pemerintah negara menyadari hubungan mereka dengan lingkungan itu lebih luas dari sekedar pertimbangan atas kondisi tertentu yang mempengaruhi mereka. Perlu ada sikap atau posisi yang disebut peranan. Dua komponen kebijakan luar negeri yang mereflesikan pertimbangan tersebut ialah orientasi dan peranan. Kedua komponen ini dapat menjelaskan mengapa suatu negara

beserta pemerintahannya menjalin hubungan dengan dunia luar. Dari jalinan hubungan ini dapat terlihat perilaku dasar dan kebutuhan nasional yang bermain di dalamnya juga kondisi eksternal yang melingkupinya (Rudi. 2001 : 141).

Orientasi, peranan dan tujuan (*objectives*) dibentuk oleh pandangan-pandangan (*images*) dalam pemikiran para pembuat kebijakan yang dinyatakan dalam bentuk sikap, keputusan dan aspirasi terhadap dunia luar. Tetapi kebijakan juga mempunyaikomponen tindakan, hal-hal yang dilakukan pemerintah suatu negara kepada negara lain dalam rangka mempengaruhi orientasi tertentu, memenuhi peranan tertentu, atau memperjuangkan dan mempertahankan tujuan negara. Suatu tindakan pada dasarnya merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk merubah atau mempertahankan perilaku pihak yang dibutuhkan si aktor agar tujuannya tercapai (Holsti, 1987 : 164)

Bergerak dari tipe umum *output* politik luar negeri (orientasi dan peranan) ke yang lebih spesifik, kita harus memperhatikan kondisi eksternal dan internal suatu negara yang berkaitan dengan tujuan (*objectives*), keputusan (*decisions*), dan tindakan (*actions*). Peranan dan orientasi sendiri tidak benar-benar menentukan tujuan, keputusan dan tindakan. Karena ketika ada konflik antara kepentingan nasional yang mendesak dan kewajiban yang berasal dari peranan nasional, maka kepentingan nasional akan didahulukan (Holsti, 1987 : 364)

United States Agency for International Development (USAID) adalah sebuah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang bersifat independen, yang diresmikan oleh John F.Kennedy, sebagai bagian dari Undang-Undang tentang

Bantuan Luar Negeri tahun 1961. Misinya adalah mengelola bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi negara-negara asing. Lembaga ini memberikan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan dan barang-barang lain, termasuk bantuan bagi korban bencana alam. Lembaga ini juga memberikan bantuan untuk program pemeliharaan kesehatan, seperti vaksinasi, imunisasi, perlindungan dari AIDS, gizi untuk ibu dan anak, dan pelayanan program Keluarga Berencana (http://www.lp3es.or .id/direktori/fund/usaid.htm (akses tanggal 11 Agustus 2009)).

USAID juga mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang ada di tingkat lokal. USAID mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan mencegah timbulnya berbagai masalah sebagai akibat dari polusi udara, penebangan hutan, pemanasan global, polusi air tanah, dan pembuangan limbah ke laut. Saat ini, USAID juga memperluas bidang kerjanya dengan membiayai sejumlah program untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil dan pengembangan kehidupan demokras (http://www.lp3es.or.id/direktori/fund/usaid.htm (Diakses tanggal 11 Agustus 2009)).

Di Indonesia sendiri, USAID memberi dukungan untuk berbagai program yang sesuai dengan misi dan tujuan lembaga ini, yaitu upaya perbaikan di bidang ekonomi dan transisi menuju demokrasi. Dalam jangka pendek, program-program USAID diharapkan dapat mengurangi dampak krisis ekonomi yang yang dialami masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, USAID terlibat dalam upaya perbaikan akibat krisis ekonomi dan politik di Indonesia. Program-program yang dijalankan antara

lain adalah program transisi menuju demokrasi, perbaikan ekonomi dan sistem finansial, perluasan lapangan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta jaminan pangan untuk kelompok masyarakat tertentu (http://www.lp3es.or.id/direktori/fund/usaid.htm (Diakses tanggal 11 Agustus 2009)).

Dengan program transisi menuju demokrasi itu, USAID telah membantu bidang pendidikan pemilih serta penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum. Di bidang keuangan, membantu usaha restrukturisasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi. Di bidang lingkungan hidup, membantu LSM dan pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan, di samping usaha pelibatan sektor swasta dalam konservasi alam. Sementara dalam masalah kesehatan, telah membantu pengadaan makanan tambahan bagi anak, obat-obatan, pelatihan untuk bidan di desa, serta pendidikan untuk pencegahan penyakit kelamin (http://www.lp3es.or.id/direktori/fund/usaid.htm (Diakses tanggal 11 Agustus 2009)).

Di Aceh, USAID mengeluarkan banyak program untuk membantu memulihkan kembali keadaan disana pasca tsunami tahun 2004, untuk memberikan fasilitas air bersih dan sanitasi USAID mengeluarkan program *Environmental Services Program* (ESP) atau Program Jasa Lingkungan yaitu program berjangka lima tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh *Development Alternatives, Inc*.(DAI). ESP memulai aktivitas di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada bulan Maret 2005 dan akan berlanjut sampai September 2009. Tujuan

dari kegiatan ESP ialah mempromosikan peningkatan kesehatan melalui perbaikan pengelolaan sumber daya air dan perluasan akses untuk air bersih dan sanitasi (http://www.esp.or.id/wp-content/uploads/pdf/fs/nad-id.pdf (Diakses tanggal 11 Agustus 2009)).

ESP di fokuskan kepada pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup. Isu tentang lingkungan hidup merupakan isu baru dalam Hubungan Internasional. Dimana runtuhnya Perang Dingin telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam konstelasi politik internasional. Berbagai perkembangan-perkembangan tersebut mengacu pada kemunculan isu-isu global, yang merupakan hasil dari proses globalisasi. Kerusakan global yang dikhawatirkan hampir pasti terjadi dan tentu akan membutuhkan keterlibatan seluruh negara di dunia.

Pada prosesnya, permasalahan terhadap lingkungan hidup merupakan pergeseran dari isu nasional yang berkembang menjadi isu global. Dapat dipaparkan bahwa isu global merupakan permasalahan, dilema dan tantangan yang secara berkaitan dengan unsur-unsur atau keperluan dasar akan perkembangan dan kemajuan internasional. Permasalahan lingkungan hidup juga merupakan permasalahan politik. Hal ini dikarenakan secara faktual banyak fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian tentang lingkungan hidup yang terjadi di berbagai negara terutama negara berkembang bersumber dari proses politik maupun kebijakan pemerintah yang salah..

John Baylis dan Steve Smith berpendapat bahwa kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global disebabkan oleh karena:

1. Permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global. Misalnya, permasalahan yang menyangkut CFCs (*Cholroflourocarbons)* berefek pada pemanasan global (*global warming)* dan meningkatkan jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon yang dirasakan di seluruh dunia.
2. Isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer.
3. Permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional, sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah disekitarnya (misalnya kebakaran hutan)
4. Banyak kegiatan eksploitasi atau degradasi lingkungan memiliki skala lokal atau nasional, dan dilakukan di banyak tempat di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, misalnya erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, polusi air dan lain sebagainya.
5. Proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi politik global (Perwita, 2005 : 144).

Menurut Emil Salim dalam bukunya *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, menyebutkan bahwa : secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat di dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan menurut *Webster's New Collegiate Dictionary International Ensyclopedia of the Social*

Science lingkungan hidup adalah, seluruh kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme. Pengertian lingkungan sebagaimana dijelaskan diatas tersebut merupakan pengertian lingkungan hidup secara luas dan umum, dalam pernyataan yang lain, yaitu menurut N.H.T Siahaan dalam bukunya *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, menjelaskan bahwa :

> Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia beserta mahluk hidup lainnya (1987: 230).

Di Nanggroe Aceh Darussalam, ESP mengambil pendekatan dari hulu ke hilir dengan tema program yang terfokus pada pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitasi pantai, dukungan manajemen dan pembiayaan bagi upaya pengelolaan DAS, air dan sanitasi untuk masyarakat, dan disain lingkungan yang berkelanjutan. ESP menggunakan bantuan teknis, pengembangan kapasitas, dan bekerja dengan masyarakat untuk meraih tujuan tersebut (http://www.esp.or.id/wp-content/uploads/pdf/fs/nad-id.pdf (Diakses tanggal 11 Agustus 2009)).

Daerah kegiatan ESP adalah dari Meulaboh hingga Banda Aceh dan DAS Krueng Aceh di Aceh Besar. ESP sudah membangun hubungan kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta, organisasi non pemerintah, kelompok masyarakat dan pihak-pihak lain untuk pembuatan kebijakan terkait kerja ESP. Inisiatif baru yang dilaksanakan di NAD ialah “Sekolah Lapangan ESP” yakni sebuah pendekatan

pendidikan agar masyarakat memiliki kendali yang lebih besar guna mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan lingkungan mereka tinggal.

ESP memiliki tiga area kunci tolak ukur kinerja keberhasilan yaitu:

1. Memperluas akses masyarakat terhadap air bersih dan jasa sanitasi
2. Memperbaiki pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang lebih baik
3. Meningkatkan produktifitas air (http://id.wikipedia.org/wiki/ESP (Diakses tanggal 9 Agustus 2009)).

Dalam prakteknya bentuk program ESP berupa pembangunan instalasi air bersih, pengelolaan sanitasi, penyuluhan kesehatan dan lingkungan, hingga pemberian dana penguatan. ESP menggunakan pendekatan "hulu ke hilir" dalam pelaksanaan programnya, serta mengintegrasikan tiga komponen utama programnya, yakni pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), peningkatan akses air dan sanitasi serta alternatif pembiayaan dan kompensasi terhadap perlindungan lingkungan. Termasuk di dalamnya kegiatan yang berhubungan dengan PDAM selaku distributor air bersih serta kesehatan dan kelangsungan hidup pengguna air (http://id.wikipedia.org/wiki/ESP (Diakses tanggal 9 Agustus 2009)).

ESP bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, organisasi non pemerintah, kelompok-kelompok komunitas dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat melalui perbaikan pengelolaan sumber daya air dan per luasan akses layanan air bersih serta sanitasi. Sebagai upaya mewujudkan misi progam, ESP mengembangkan program kerja yang bersifat lintas

sektoral, dengan kegiatan yang bersifat menyeluruh (http://id.wikipedia.org/wiki/ESP (Diakses tanggal 9 Agustus 2009)).

Program *Environmental Services Program* (ESP) berusaha menyediakan air bersih kepada masyarakat di Aceh, untuk kebutuhan sehari-hari.

> "Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air bersih untuk diminum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini "(http://wapedia.mobi/id/Air_bersih (Diakses tanggal 10 Agustus 2009)).

Ketiadaan air bersih mengakibatkan:

1. Penyakit diare. Di Indonesia diare merupakan penyebab kematian kedua terbesar bagi anak-anak dibawah umur lima tahun. Sebanyak 13 juta anak-anak balita mengalami diare setiap tahun. Air yang terkontaminasi dan pengetahuan yang kurang tentang budaya hidup bersih ditenggarai menjadi akar permasalahan ini. Sementara itu 100 juta rakyat Indonesia tidak memiliki akses air bersih.
2. Penyakit cacingan.
3. Pemiskinan. Rumah tangga yang membeli air dari para penjaja membayar dua kali hingga enam kali dari rata-rata yang dibayar bulanan oleh mereka yang

mempunyai sambungan saluran pribadi untuk volume air yang hanya sepersepuluhnya (http://mailsvr.pdam-sby.go.id/bacaberita.asp?Berita=298&Tgl=5/7/2009%2011:45:24%20AM (Diakses tanggal 10 Agustus 2009)).

> ”Sedangkan Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia” (http://www.menkokesra.go.id/content/view/11603/39/ (Diakses tanggal 10 Agustus 2009)).

Bahaya ini mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki septik), atau praktek kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun) (http://www.menkokesra.go.id/content/view/11603/39/ (Diakses tanggal 10 Agustus 2009)). Contoh contoh dari pengelolaan sanitasi antaraa lain : Pembuangan Kotoran Manusia melalui toilet atau jamban, Pengelolaan Limbah Padat, Pengelolaan Limbah Cair dan pengelolaan limbah lainnya (http://beta.sanitasi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=157:standar-minimal-penyediaan-air-bersih-dan-sanitasi-di-daerah-bencana&catid=55:artikel&Itemid=125 (Diakses tanggal 2 November 2009)).

Terdapat hubungan yang erat antara masalah sanitasi dan penyediaan air, dimana sanitasi berhubungan langsung dengan:

1. Kesehatan. Semua penyakit yang berhubungan dengan air sebenarnya berkaitan dengan pengumpulan dan pembuangan limbah manusia yang tidak benar. Memperbaiki yang satu tanpa memperhatikan yang lainnya sangatlah tidak efektif.
2. Penggunaan air. Toilet siram desain lama membutuhkan 19 liter air dan bisa memakan hingga 40% dari penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan jumlah penggunaan 190 liter air per kepala per hari, mengganti toilet ini dengan unit baru yang menggunakan hanya 0,7 liter per siraman bisa menghemat 25% dari penggunaan air untuk rumah tangga tanpa mengorbankan kenyamanan dan kesehatan. Sebaliknya, memasang unit penyiraman yang memakai 19 liter air di sebuah rumah tanpa WC bisa meningkatkan pemakaian air hingga 70%. Jelas, hal ini tidak diharapkan di daerah yang penyediaan airnya tidak mencukupi, dan hal tersebut juga bisa menambah jumlah limbah yang akhirnya harus dibuang dengan benar.
3. Biaya dan pemulihan biaya. Biaya pengumpulan, pengolahan dan pembuangan limbah meningkat dengan cepat begitu konsumsi meningkat. Merencanakan hanya satu sisi penyediaan air tanpa memperhitungkan biaya sanitasi akan menyebabkan kota berhadapan dengan masalah lingkungan dan biaya tinggi yang tak terantisipasi. Pada tahun 1980, Bank Dunia melaporkan bahwa dengan menggunakan praktek-praktek konvesional, untuk membuang air dibutuhkan

biaya lima sampai enam kali sebanyak biaya penyediaan. Ini adalah untuk konsumsi sekitar 150 hingga 190 liter air per kepala per hari. Informasi lebih baru dari Indonesia, Jepang, Malaysia dan A. S. menunjukkan bahwa rasio meningkat tajam dengan meningkatnya konsumsi; dari 1,3 berbanding 1 untuk 19 liter per kepala per hari menjadi 7 berbanding 1 untuk konsumsi 190 liter dan 18 berbanding 1 untuk konsumsi 760 liter (http://www.usembassyjakarta.org/ptp/airbrs5.html (Diakses tanggal 10 Agustus 2009).

Penggunaan ulang air. Jika sumber daya air tidak mencukupi, air limbah merupakan sumber penyediaan yang menarik, dan akan dipakai baik resmi disetujui atau tidak. Karena itu peningkatan penyediaan air cenderung mengakibatkan peningkataan penggunaan air limbah, diolah atau tidak dengan memperhatikan sumber-sumber daya tersebut supaya penggunaan ulang ini tidak merusak kesehatan masyarakat. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (http://www.usembassyjakarta.org/ptp/airbrs5.html. (Diakses tanggal 10 Agustus 2009)).

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian sebelumnya dan guna memudahkan dalam memberikan gambaran bagi peneliti terhadap penelitian yang dilakukan, peneliti menarik sebuah hipotesis sebagai berikut :

"USAID melalui program *The Environmental Services Program* (ESP) telah membantu memperbaiki pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan kepada masyarakat Aceh pasca bencana tsunami tahun 2004"

1.6.3 Definisi Operasional

Berdasarkan hipotesis yang telah diselesaikan oleh peneliti maka definisi operasional dari hipotesis atas "Peranan USAID melalui *The Environmental Services Program* (ESP) dalam Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi di Aceh" adalah sebagai berikut:

- *United States Agency for International Development* (USAID) sebagai sebuah organisasi pemerintah federal Amerika Serikat yang bersifat independen, yang diresmikan oleh John F.Kennedy, sebagai bagian dari Undang-Undang tentang Bantuan Luar Negeri tahun 1961. Misi nya adalah mengelola bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi negara-negara asing.
- *Environmental Services Program* (Program Jasa Lingkungan : ESP) adalah program selama lima puluh delapan bulan (Desember 2004 sampai September 2009) yang dibiayai oleh *United States Agency for Internasional Development*

(USAID) dengan misi meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan air yang lebih baik, memperluas akses masyarakat terhadap air bersih, dan sanitasi.

- Fasilitas air bersih dan sanitasi yang berkurang di Aceh karena adanya bencana tsunami tahun 2004, berakibat pada penurunan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah dan bantuan asing baik dari negara lain ataupun organisasi-organisasi internasional.

1.7 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu yang tujuannya untuk mendeskripsikan apa yang ada atau apa yang sudah ada. Mengambarkan secara cermat karateristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti serta berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti, disamping itu penelitian deskriptif juga mengambarkan suatu proses mekanisme dan keterkaitan variable-variabel yang ada dalam situasi tertentu dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada (Mardalis, 2002 : 26).

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah sarana dimana informasi dan pengalaman ditransformasikan kedalam data atau bukti yang ada untuk menguji proposisi yang dihanggap dapat menjelaskan bagaimana bagian dari kenyataan emperis berjalan. Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengusahkan bahan-bahan yang ada korelasi dengan penelitian dan penulisan rancangan penelitian ini melalui sejumlah rangkaian penelitian atas data-data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah, surat kabar, serta sumber-sumber informasi lain, termasuk data dari internet yang dapat dijustifikasikan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. USAID Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 3-5, Jakarta, Indonesia 10110
2. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Jl. Dipati Ukur No.112-114, Bandung
3. Perpustakaan Universitas Parahyangan (UNPAR), Jl. Ciumbuleuit, Bandung
4. Kantor Pusat USAID dalam program *Enviromental Service Program*. Ratu Plaza Building, 17th. Fl.Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta 10270

Tabel 1.2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun	Bulan ke											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengajuan Judul	2008												
2.	Usulan Penelitian	2008												
3.	Bimbingan	2008												
4.	Seminar Usulan Penelitian	2010												
5.	Pengumpulan Data	2008												
6.	Sidang	2012												
7.	Rencana Wisuda	2012												

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I : Sebagai Bab Pendahuluan yang akan memuat latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, maksud dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode peneltian serta lokasi dan waktu penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka pada bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang relevan dengan subjek yang diteliti, seperti organisasi non pemerintah dan lingkungan hidup. Tinjauan pustaka ini dapat pula berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian yang dapat dijadikan asumsi yang memungkinkan penalaran untuk menjawab masalah yang diajukan,

Bab III : Berisikan tentang deskripsi dari obyek penelitian dalam hal ini tentang peranan *United States Agency for International Development* (USAID) dengan kegiatan-kegiatanya dalam program *The Environmental Services Program* (ESP) serta gambaran umum dari ketersediaan air bersih dan sanitasi di Aceh yang berkurang setelah bencana tsunami tahun 2004.

BAB IV : Hasil peneltian dan pembahasan, merupakan bab yang mendeskripsikan hasil penelitian dari hubungan variabel penjelasan dan variabel yang akan dijelaskan dan kemudian dianalisis hubungannya dalam penelitian ini yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah dan hipótesis serta menganalisis peranan USAID melalui program *The Environmental Services Program* (ESP) dalam usahanya menyediakan ketersediaan air bersih dan sanitasi di Aceh pasca bencana tsunami tahun 2004.

BAB V : Kesimpulan dan saran sebagai bab penutup, bab ini akan berisi kesimpulan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan data-data yang ada kemudian akan memberikan saran-saran bagi peneliti lain yang berminat melanjutkan atau mengoreksi hasil penelitian ini.